



RENCANA KERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah	47
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	50
BAB V Penutup	64



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



NO. Sertifikat : 008/MHI-SMAP
SNI ISO 37001:2016 SMAP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3
Gambar 3.1 Delapan Misi (Asta Cita) Prioritas Nasional	46
Gambar 3.2 Prioritas Pembangunan RKP 2026	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024	12
Table 2.2 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan	17
Table 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor	19
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2025	22
Tabel 2.5 Kekuatan dan Kelemahan serta Peluang dan Tantangan yang dihadapi	27
Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2026	29
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026	48
Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026	51



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 19 Tahun 2025

TANGGAL : 24 Juni 2025

TENTANG : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 142 ayat 1 dan 2 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menyatakan bahwa Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah Kota Bogor menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045 yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 serta Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



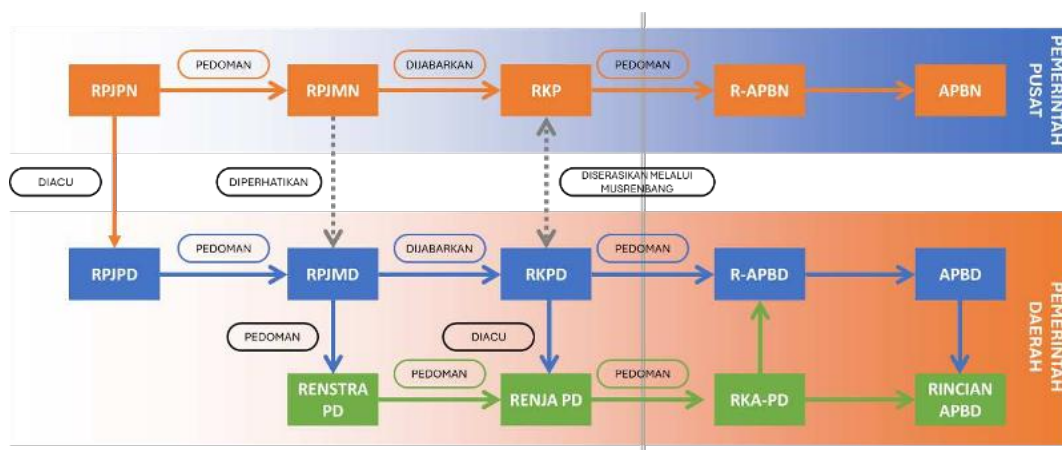
NO. Sertifikat : 008/MIH-SMAP
SNI ISO 37001:2016 SMAP

Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan awal,
- b. Penyusunan rancangan,
- c. Perumusan rancangan akhir, dan
- d. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

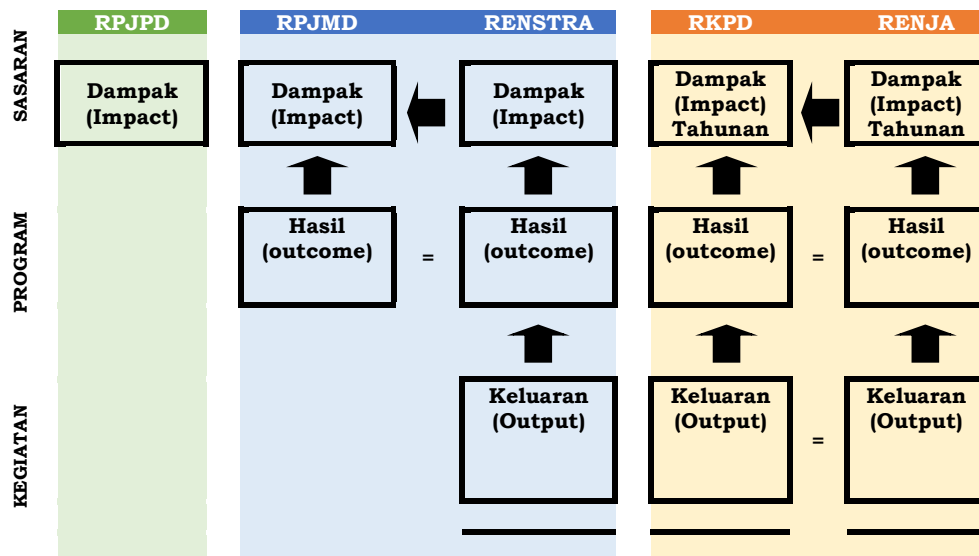


Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat in-line dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Bogor disusun berdasarkan kebijakan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2026 yang didalamnya



telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD Kota Bogor tahun 2025-2045 dan RPJMD serta Rancangan Renstra PD Kota Bogor tahun 2025-2029. Berikut Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);



40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
43. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025 – 2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);
44. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan atau pedoman Perencanaan dan Penganggaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan



- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Uraian mengenai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 ini dilaksanakan sebagai bagian dari siklus manajemen pembangunan daerah, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana target, sasaran, serta program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya dapat direalisasikan.

Melalui evaluasi tersebut Inspektorat Daerah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, efektivitas program, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan. Analisis ini tidak hanya menyoroti keberhasilan yang telah diraih, tetapi juga mengidentifikasi berbagai permasalahan strategis yang memerlukan perhatian dan perbaikan pada perencanaan tahun berikutnya.

Selain itu hasil evaluasi ini menjadi landasan utama dalam merumuskan rencana kerja tahun 2025. Dengan memperhatikan capaian maupun kekurangan pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memperkuat peran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dengan demikian hal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi capaian kinerja masa lalu, tetapi juga sebagai pijakan penting dalam memastikan kesinambungan, konsistensi, dan relevansi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pengawasan.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024



merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2024. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	3,4	3,54	104,12
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	90,1	90,75	113,44
		Gap Analysis Kompetensi	Persen	14,2	13,90	102,16
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	Persen	100	100,00	100,00
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6,00	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024
6.01.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5,00	100,00
6.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	100	100,00	100,00
6.01.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	53	53,00	100,00
6.01.0 1.2.02. 0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	17,00	100,00
6.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100,00	100,00
6.01.0 1.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	53	53,00	100,00
6.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100	85,88	85,88
6.01.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4,00	100,00
6.01.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6,00	100,00
6.01.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0,72	71,91
6.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	4,60	65,68
6.01.0 1.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1,00	100,00
6.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Persen	100	100,00	100,00
6.01.0 1.2.07. 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	1,00	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024
6.01.0 1.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	67	67,00	100,00
6.01.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	19,00	100,00
6.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100,00	100,00
6.01.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	7	7,00	100,00
6.01.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6,00	100,00
6.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup Inspektorat berondisi baik	Persen	100	83,00	83,00
6.01.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7,00	100,00
6.01.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	92	54,00	58,70
6.01.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1,00	100,00
6.01.0 2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	Persen	78	97,22	124,64
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen	78	100,00	128,21
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	Persen	90	87,74	97,49
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	Persen	90	88,99	98,88
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95	100,00	105,26
6.01.0 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen	100	-	0,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024
		Persentase capaian target pengawasan keuangan daerah	Persen	100		0,00
		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	kegiatan	2		0,00
		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	kegiatan	2		0,00
6.01.0 2.2.01. 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	6	6,00	100,00
6.01.0 2.2.01. 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	36	36,00	100,00
6.01.0 2.2.01. 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1,00	100,00
6.01.0 2.2.01. 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1,00	100,00
6.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan	Persen	100	100	100,00
6.01.0 2.2.02. 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugianrnnnegara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1,00	100,00
6.01.0 2.2.02. 0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	1,00	1,00
6.01.0 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Persen	100	100,00	100,00
		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	1	3,00	300,00
		Persentase Capaian MCP KPK	Persen	95	91,00	95,79
6.01.0 3.2.02	Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko	Persen	90	-	0,00
		Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK	Unit Kerja	11	11,00	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024
		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor	kegiatan	2	2,00	100,00
6.01.0 3.2.02.0001	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	36,00	100,00
6.01.0 3.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	36,00	100,00
6.01.0 3.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	36	36,00	100,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH			507	465	91,98

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada Indikator Persentase Capaian MCP KPK pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi target tidak tercapai, faktor penghambat dengan tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan terdapat komponen yang sifatnya substantif tidak dapat dipenuhi berdasarkan hasil evaluasi oleh KPK seperti pada komponen optimalisasi pajak daerah dengan nilai hasil evaluasi sebesar 88 akibat belum adanya database penanganan piutang pajak dan potensi penerimaan pajak dan komponen pengelolaan barang milik daerah dengan nilai hasil evaluasi sebesar 85 akibat belum terpenuhinya target sertifikasi tanah dan belum terdapat aktifitas dan administrasi terkait penertiban terhadap barang milik daerah. Upaya yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mencapai Indikator tersebut dengan melaksanakan sosialisasi dan kordinasi dengan Perangkat Daerah yang terlibat dalam menanggapi hasil evaluasi dalam Upaya pencapaian MCP KPK;



2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN YANG MEMENUHI TARGET KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
6.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan secara berkala
6.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Adanya Pelaporan administrasi keuangan yang tepat waktu
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan
6.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya ketersediaan anggaran dan kebutuhan diklat dalam menunjang kualitas APIP
6.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik.
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Adanya pemeliharaan Sistem Aplikasi
6.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH	Ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana, Inventarisasi
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Ketersediaan Mebeulair
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya



KODE	PROGRAM/KEGIATAN YANG MEMENUHI TARGET KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
6.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Adanya anggaran jasa penunjang
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Adanya anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya anggaran Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Adanya komitmen dalam menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
6.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Komitmen dalam pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Komitmen dalam pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Komitmen dalam pelaksanaan Kerja Sama Pengawasan Internal
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Komitmen dalam Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Komitmen dalam menangani tindak lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Komitmen dalam melaksanakan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Adanya komitmen dalam menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Adanya komitmen dalam menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Komitmen dalam melaksanakan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Komitmen dalam melaksanakan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Komitmen dalam melaksanakan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



Sebagaimana faktor penghambat dan pendukung pada Tahun 2024 yang telah dijelaskan pada point 1 dan 2, maka beberapa kebijakan/tindakan tersebut dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2026, sehingga dapat menjaga kualitas pencapaian untuk Tahun 2026.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan	Target Akhir
1	Level Kapabilitas APIP	Level	3 (3,52)	3 (3,00)	3 (3,600)	120,00	2,67	3 (3,00)
2	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Point	85,22	82	90,71	110,62	7,33	82
3	Level Maturitas SPIP	Level	3 (3,296)	3 (3,000)	3 (3,325)	110,83	0,88	3
4	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Point	16,94	22,50	17,44	77,51	2,95	22,50
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	76,18	75,50	77,54	102,70	5,20	75,50



Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk periode tahun 2019-2024 dalam mendukung 2 (dua) Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah yang didukung pencapaiannya melalui 2 (dua) Indikator;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah yang didukung pencapaiannya melalui 3 (tiga) Indikator.

Berikut hasil Analisa pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 yang disandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP dengan target indikator level 3 dengan point 3,000 dan realisasi level 3 point 3,600 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.09.03/LHP-409/PW10/6/2024 perihal : Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024, maka capaian untuk Level Kapabilitas APIP tahun 2024 sebesar 109,22 persen dan tingkat kemajuan terhadap realisasi akhir sebesar 2,27 persen. Melihat hasil positif ketercapaian level kapabilitas APIP tersebut disebabkan adanya peningkatan dari capaian sebelumnya tahun 2023 pada elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola;
2. Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah target point 82 dan realisasi point 90,71 Sesuai dengan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat melalui aplikasi Surabi Atas Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Tahun 2024, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat mencapai 110,62 persen dengan capaian 90,71 persen dari target sebesar 82 persen. Melihat hasil positif ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah, hal ini didukung oleh komitmen Kepala Inspektur dalam meningkatkan Reformasi Birokrasi, penataan proses pelaksanaan pelayanan pengawasan melalui sistem aplikasi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;



3. Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP dengan target indikator level 3 dengan point 3,000 dan realisasi level 3 point 3,325 sesuai surat yang dikeluarkan oleh BPKP Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.03/LHP-773/PW10/3.2/2024 perihal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 capaian Level Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024, maka capaian untuk Level Maturitas SPIP tahun 2024 sebesar 110.83 persen. Melihat hasil positif ketercapaian Level Maturitas SPIP tersebut masih perlu dilakukan peningkatan dalam mencapai Bobot Penetapan Tujuan Struktur dan Proses, Bobot Struktur dan Proses Pencapaian Tujuan dan Bobot Pencapaian Tujuan;
4. Indikator Kinerja Utama Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota target point 22,50 dan realisasi point 17,44 berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/227/AA.05/2024 perihal: Hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Capaian nilai Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Kota Bogor Tahun 2024 mencapai 77.51 persen dengan nilai 17.51 dari target nilai 22.5. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai yaitu Indikator Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota, Capaian nilai Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Kota Bogor Tahun 2024 mencapai 77.51 persen dengan nilai 17.51 dari target nilai 22.5. Sehingga pada tahun 2024 pencapaian kinerja dalam mencapai target tidak tercapai namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 nilai Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 2.95 persen dari nilai 16.9;
5. Indikator Kinerja Utama Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan target 75,5 persen dan realisasi sebesar 77,54 persen sesuai dengan hasil yang tertuang dalam website : <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=6d390aca> yang dikelola oleh Komisi



Pemberantasan Korupsi (KPK), maka capaian untuk Indeks Persepsi Anti Korupsi tahun 2024 sebesar 102,70 persen dengan nilai 77.54 dari target 75.5.

Untuk tahun 2026 Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami transisi dalam perencanaan, dimana untuk tahun 2026 sudah mengacu terhadap rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II masih terdapat 10 (sepuluh) indikator yang belum ada capaian dikarenakan masih dalam tahapan proses baik oleh Tingkat daerah maupun pusat. Berikut dapat disampaikan hasil evaluasi kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025 yang masih mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sampai dengan Triwulan II dibawah ini:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Kota Bogor Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2025
1	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja	1.1 Jumlah Unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	4	5	2
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	Persen	87,74	91	-
		2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	Persen	88,99	89	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah	3.1 Nilai SAKIP Tingkat Kota Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	17,44	18,1	-



NO	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2025
		3.2	Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP Hasil Evaluasi BPKP	Nilai	0,875	0,878	-
		3.3	Nilai Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan pada Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai	1	1	-
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	4.1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	AA	
		4.2	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK/Inspektorat Daerah	Persen	100	100	
		4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	3,41	3,56	3,615
		4.4	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi	N/A	1	

Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 sampai dengan semester I dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Pada tahun 2024 terdapat 4 unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM. Target tahun 2025 ditetapkan sebanyak 5 unit kerja, dan hingga Semester I telah tercapai 2 unit kerja yang diusulkan. Kondisi ini menunjukkan adanya progres awal yang baik serta komitmen



berkelanjutan dari Inspektorat Daerah untuk mendorong peningkatan integritas melalui pengusulan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM.

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal.

Capaian tahun 2024 sebesar 87,74%, dengan target tahun 2025 sebesar 91%. Hingga Semester I 2025, realisasi masih menunggu pemutakhiran data dari BPK. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal telah dilaksanakan dengan baik dan menjadi landasan optimisme pencapaian target pada akhir tahun.

3. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

Tahun 2024 tercatat sebesar 88,99%, mendekati target tahun 2025 yaitu 89%. Pada Semester I 2025 realisasi belum diperbarui karena masih menunggu pemutakhiran dari Inspektorat Provinsi. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, peluang pencapaian target tahun 2025 tetap terbuka lebar melalui penguatan mekanisme koordinasi serta monitoring tindak lanjut rekomendasi.

4. Nilai SAKIP Tingkat Kota – Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Realisasi tahun 2024 sebesar 17,44, dengan target 2025 ditetapkan 18,1. Hingga Semester I 2025, penilaian belum dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi KemenPANRB. Dengan capaian yang cukup mendekati target, terdapat ruang perbaikan yang dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP pada tahun berjalan.

5. Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP – Hasil Evaluasi BPKP.

Capaian tahun 2024 tercatat sebesar 0,875, dengan target 2025 sebesar 0,878. Pada Semester I 2025, proses masih dalam tahap entry data aplikasi BPKP sehingga hasil belum tersedia. Meskipun demikian, tren capaian tahun sebelumnya menunjukkan konsistensi yang perlu terus dijaga agar target tahunan dapat terpenuhi.

6. Nilai Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pencapaian Tujuan SPIP.

Realisasi tahun 2024 sebesar 1, telah memenuhi target tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 1. Hingga Semester I 2025, data penilaian masih



dalam proses entry oleh BPKP. Dengan capaian sebelumnya yang sudah optimal, indikator ini diproyeksikan dapat dipertahankan sesuai target tahunan.

7. Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2024 memperoleh predikat AA, dan target 2025 tetap ditetapkan pada predikat yang sama. Hingga Semester I 2025, penilaian masih menunggu hasil evaluasi, namun capaian tahun sebelumnya memberikan keyakinan bahwa predikat tersebut dapat dipertahankan.

8. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat Daerah.

Capaian tahun 2024 mencapai 100%, sesuai dengan target 2025 sebesar 100%. Hingga Semester I 2025 capaian masih dalam tahap pemantauan, namun tren capaian sebelumnya mengindikasikan adanya komitmen penuh dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Realisasi tahun 2024 tercatat 3,41, dengan target tahun 2025 sebesar 3,56. Hingga Semester I 2025 telah tercapai nilai 3,615 yang melampaui target tahunan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan nyata kualitas pelayanan publik dan respon positif dari Perangkat Daerah terhadap kinerja Inspektorat.

10. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100.

Pada tahun 2024 belum terdapat capaian (N/A). Sementara itu, target tahun 2025 ditetapkan sebesar 1 inovasi, dan hingga Semester I telah berjalan proses pengembangan aplikasi pengawasan SIMAPAN (Sistem Manajemen Pengawasan). Inovasi ini diproyeksikan mampu mendukung efektivitas pengawasan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif meskipun sebagian besar indikator masih menunggu hasil evaluasi resmi dari instansi terkait. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari



mekanisme penilaian yang terpusat pada kementerian/lembaga, seperti BPKP, KemenPANRB, Setda, maupun KPK. Kendati demikian, capaian tahun sebelumnya yang relatif tinggi memberikan landasan yang kokoh dan keyakinan kuat bahwa target tahun 2025 dapat tercapai dengan baik.

Beberapa indikator menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, seperti capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang sudah melampaui target tahunan pada Semester I 2025. Hal ini menandakan bahwa upaya perbaikan layanan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Daerah telah dirasakan manfaatnya oleh perangkat daerah. Selain itu, inisiatif pengembangan inovasi SIMAPAN (Sistem Manajemen Pengawasan) juga menjadi wujud nyata komitmen untuk menghadirkan sistem pengawasan yang lebih modern, transparan, dan berdaya guna.

Sedangkan untuk indikator lain seperti tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan serta nilai maturitas SPIP menunjukkan tren capaian yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa meskipun masih menunggu validasi penilaian dari lembaga berwenang, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah berjalan pada jalur yang tepat.

Dengan mempertimbangkan capaian, progres, dan inisiatif perbaikan yang telah dilakukan, Inspektorat Daerah Kota Bogor meyakini bahwa target kinerja tahun 2025 dapat direalisasikan sesuai harapan. Pencapaian ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pengawasan, tetapi juga mencerminkan peran strategis Inspektorat Daerah dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kota Bogor menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen utama penilaian kinerja. IKU ini menjadi tolok ukur sejauh mana tujuan strategis dapat diwujudkan secara terukur, obyektif, dan akuntabel.



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, khususnya sepanjang Tahun 2024, Inspektorat Daerah menghadapi berbagai kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu dicermati sebagai bahan evaluasi.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang ditemui dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan serta Peluang dan Tantangan
yang Dihadapi Selama Tahun 2024

KEKUATAN	KELEMAHAN
Kedudukan Inspektorat sebagai APIP dengan mandat strategis dalam pengawasan.	Kapasitas SDM auditor belum merata, sebagian belum tersertifikasi.
Dukungan regulasi nasional terkait SPIP, RB, dan pengawasan intern.	Beban mandatory pengawasan dari pusat seringkali tidak seimbang dengan jumlah auditor.
Komitmen pimpinan daerah terhadap penguatan integritas dan akuntabilitas.	Data hasil pengawasan belum terintegrasi secara menyeluruh antar sistem.
Tersedianya dasar hukum untuk mendorong tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan masih terbatas.

Selain kekuatan dan kelemahan, Inspektorat Daerah juga menghadapi sejumlah peluang dan tantangan yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan. Gambaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PELUANG	TANTANGAN
Perkembangan teknologi digital yang mendukung transformasi pengawasan.	Kompleksitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah yang semakin meningkat.
Dukungan kebijakan nasional dalam memperkuat peran APIP menuju level kapabilitas lebih tinggi.	Tingginya risiko penyalahgunaan kewenangan dan potensi korupsi.



PELUANG	TANTANGAN
Tuntutan publik terhadap transparansi dan pemerintahan yang bersih sebagai momentum perbaikan.	Tekanan dari mandatory pengawasan pusat yang semakin banyak dan bersifat wajib.
Kolaborasi dengan BPKP, BPK, dan APIP lain sebagai peluang penguatan kapasitas.	Ekspektasi publik terhadap hasil pengawasan yang cepat, akurat, dan berdampak langsung.

Berdasarkan evaluasi atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sepanjang Tahun 2024, maka dirumuskan strategi yang menjadi catatan serta rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2026. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan Kompetensi APIP melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan, monitoring, dan evaluasi;
3. Penguatan Peran Inspektorat dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan;
4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan serta fungsi asistensi dan pendampingan terhadap perangkat daerah;
6. Strategi Kolaborasi dan Sinergi dengan Lembaga Pengawasan Eksternal maupun APIP lain dan emperkuat sistem deteksi dini (early warning system) untuk mencegah potensi fraud maupun penyimpangan lainnya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2026 disajikan pada tabel 2.6 berikut:



Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)	
Bidang Urusan Pengawasan					27.598.333.961		Bidang Urusan Pengawasan					29.295.420.165	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	100	100	122.372.800	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	100	173.759.400	
		Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP	Persen	100	100	397.946.700			Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP	Persen	100	361.141.600	
		Persentase Nilai Hasil Evaluasi Internal SAKIP Tingkat Perangkat Daerah Minimal 20	Persen	69,44	74,29	138.698.000			Persentase Nilai Hasil Evaluasi Internal SAKIP Tingkat Perangkat Daerah Minimal 20	Persen	74,29	126.710.000	



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Target Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	520.319.500		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Target Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	534.901.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP	Perangkat Daerah	36	35	138.698.000			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP	Perangkat Daerah	35	126.710.000
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	4	4	122.372.800		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	4	173.759.400



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	36	35	124.170.000		Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	35	126.710.000
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	3	3	14.528.000		Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	3	14.746.000
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	3	3	157.643.000		Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	3	155.474.000
	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	240.303.700		Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	190.921.600



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan/Pengaduan yang Ditindaklanjuti dengan PDTT	Persen	100	100	55.127.700		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan/Pengaduan yang Ditindaklanjuti dengan PDTT	Persen	100	56.343.600
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2	33.520.000		Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	34.618.000
	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	2	2	21.607.700		Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	2	21.725.600



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai ≥ 75	Persen	38,89	45,71	120.527.400	1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai ≥ 75	Persen	45,71	120.527.400
		Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP Hasil Penjaminan Kualitas oleh APIP	Nilai	1,113	1,119	172.320.500			Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP Hasil Penjaminan Kualitas oleh APIP	Nilai	1,119	172.320.500
		Persentase Capaian MCP KPK Pada Komponen Pengawasan APIP	Nilai	91	91	92.458.000			Persentase Capaian MCP KPK Pada Komponen Pengawasan APIP	Nilai	91	350.070.000
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata Nilai ZI Perangkat Daerah	Persen	67,36	70,49	120.527.400		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata Nilai ZI Perangkat Daerah	Persen	70,49	120.527.400



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan	Perangkat Daerah	36	35	264.778.500			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan	Perangkat Daerah	35	522.390.500
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	36	35	120.527.400		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	35	120.527.400
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	35	172.320.500		Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	35	172.320.500
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	Kegiatan		2	92.458.000		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Kegiatan	2	350.070.000



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	90,75	90,85	297.999.200		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	90,85	297.999.200
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100	100	22.205.336.527			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100	22.205.336.527
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Pelayanan	Nilai	88,5	89,5	5.487.555.538			Nilai Hasil Survey Kepuasan Pelayanan	Nilai	89,5	5.524.093.538
		Jumlah Inovasi yang dibangun atau dikembangkan	Inovasi	N/A	1				Jumlah Inovasi yang dibangun atau dikembangkan	Inovasi	1	



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	Persen	100	100	300.919.550		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	Persen	100	297.999.200
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	3	105.924.000		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	105.924.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	9	192.075.200		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	192.075.200



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	Persen	100	100	22.124.397.986		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	Persen	100	22.205.336.527
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	53	54	22.069.515.986,00		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	54	22.150.272.527,19
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	Laporan	13	13	54.882.000,00		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	Laporan	13	55.064.000,00



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
		Semesteran SKPD							Semesteran SKPD			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	795.864.600		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.480.413.200
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	54	54	795.864.600		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	54	1.480.413.200
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	1.064.220.100		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	1.490.654.200



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	101.219.400		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	228.283.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	39.044.500		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	67.117.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	40.135.200		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	56.969.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	786.103.000		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.036.544.000



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	97.718.000		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	101.740.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	Persen	100	100	700.238.400		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	Persen	100	708.744.700
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		36.538.000



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	312.159.300		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	335.248.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	17	388.079.100		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	336.958.700
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	624.262.735		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	624.996.871
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	178.521.551		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	178.521.551



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	445.741.184		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	446.475.320
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	100	888.979.490		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	1.219.284.567
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	7	7	249.373.365		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	249.373.365



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2026		No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026	
					Target	Rp(dlm juta)					Target	Rp(dlm juta)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		45	243.841.328		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	45	141.742.828
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	unit	1	1	395.764.797		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	unit	1	828.168.374



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan oleh Masyarakat yang diajukan melalui tahapan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang kemudian dilakukan penelaahan atau klarifikasi usulan program dan kegiatan masyarakat melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang Tahun 2025.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang sesuai dengan prioritas Pembangunan daerah Kota Bogor maupun penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dengan demikian, tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi pedoman strategis bagi seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, serta tantangan yang diproyeksikan pada tahun perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap langkah yang ditempuh Inspektorat Daerah senantiasa selaras dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih jauh tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk dijadikan ukuran kinerja, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, serta akuntabilitas publik. Dengan adanya arah yang jelas, Inspektorat Daerah Kota Bogor diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat fungsi pengendalian internal, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan Sasaran utama adalah mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN tahap I tahun 2025-2029 yang memiliki 8 (delapan) Misi atau Asta Cita yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1
Delapan Misi (Asta Cita) Prioritas Nasional



Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang bertema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif” sebagai penjabaran dari tema RPJMN 2025-2049, yang secara spesifik tercantum pada gambar 3.2 di bawah ini:



Gambar 3.2
Prioritas Pembangunan RKP 2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tema Pembangunan Kota Bogor yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 adalah *"Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Menopang Daya Saing Daerah"*. Tema ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing Kota Bogor di tengah dinamika pembangunan daerah maupun nasional.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor tersebut, dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani;
2. Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan;
3. Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi;
4. Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana.

Rumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 tersebut disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2026, serta mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD. Selain itu, prioritas ini juga diarahkan untuk mendukung sinergi dengan pembangunan tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pembangunan nasional Tahun 2026.



Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, setiap perangkat daerah memiliki kontribusi yang saling melengkapi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Visi Kota Bogor, yaitu “Bogor Beres, Bogor Maju”, mengandung makna penting bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus ditata dengan tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus didorong ke arah kemajuan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung visi tersebut, Pemerintah Kota Bogor menetapkan sejumlah misi strategis, salah satunya adalah Misi Bogor Cerdas. Dalam kerangka misi Bogor Cerdas, tujuan yang ingin dicapai adalah “Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif (Smart Government)”. Tujuan ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam birokrasi, tetapi juga menekankan perlunya aparatur pemerintah yang adaptif, berintegritas, serta mampu berkolaborasi lintas sektor demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 tersebut, serta menyesuaikannya dengan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maka rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 ditetapkan sejalan dengan arah pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2029 dengan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2026

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pengelolaan	1.1	Jumlah Unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	3	5



NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
	korupsi, akuntabel dan melayani	zona integritas pada Unit Kerja					
2	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akuntabel dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	Persen	94,41	91
			2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	Persen	86,85	89
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah	3.1	Nilai SAKIP Tingkat Kota Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	17,44	18,2
			3.2	Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP Hasil Evaluasi BPKP	Nilai	0,875	0,885
			3.3	Nilai Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan pada Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai	1	1
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	4.1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA (90,75)	AA (90,80)
			4.2	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi BPK/Inspektorat Daerah	Persen	100	100
			4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	3,41	3,58
			4.4	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi	N/A	1



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja disertai pagu indikatifnya.

Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2026 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 yang diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan berorientasi pada pelayanan publik, yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya.

Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 disajikan pada tabel 4.1 berikut sesuai dengan hasil entri dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai acuan dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja pada tahun anggaran berjalan.



Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KOTA BOGOR
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						28.002.630.638,00							0,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						28.002.630.638,00							0,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						28.002.630.638,00							0,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						26.903.179.538,00						-	0,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	-			100 Persen	304.790.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	104.931.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	199.859.050,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT

SIPD-RV : dicetak pada 2025-08-29 14:57:31

Halaman 1



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	-			100 Persen	22.245.651.616,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	22.190.769.616,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	54.882.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor			0,00	INSPEKTORAT



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	795.864.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	795.864.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.002.556.734,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	71.666.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	51.438.134,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40.135.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	741.599.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	97.718.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMd	-			100 Persen	710.034.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	37.828.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	335.248.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	336.958.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 Persen	624.996.871,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	178.521.551,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	446.475.320,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	-			100 Persen	1.219.284.567,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	249.373.965,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 Unit	141.742.828,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	828.168.374,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						714.145.200,00						-	0,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-			35 Perangkat Daerah 100 %	659.017.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	124.170.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	14.528.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	157.643.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal															
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	240.303.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	122.372.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan/Pengaduan yang Ditindaklanjuti dengan PDPT	-			100 Persen	55.127.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Perangkat Daerah	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	33.520.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				2 Laporan	21.607.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						385.305.900,00						-	0,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi Rata-rata Nilai ZI Perangkat Daerah	-			35 Perangkat Daerah 70,46 Nilai	385.305.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	-	Perangkat Daerah	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	172.320.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				6 perangkat daerah	0,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	92.458.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	120.527.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
		J U M L A H						28.002.630.638,00						0,00		



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta fungsi Inspektorat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penyusunan dokumen ini berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2029 serta Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2026.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan rencana pembangunan tahunan terkait peran Inspektorat Daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada aspek pengawasan, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat memberikan dukungan positif bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang lebih bersih, transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

Bogor, Juli 2025

